

TESIS

**PENERAPAN ASAS – ASAS HUKUM LELANG DALAM PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.06/2016 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG**



PRO PATRIA

Disusun Oleh:

MEILANY LIEM BONO

NIM: 12214038

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

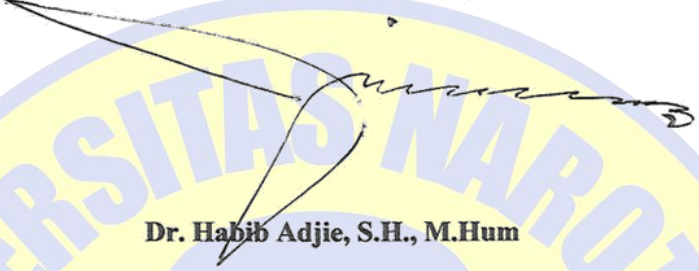
2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah Disetujui

Pada tanggal Februari 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum



PRO PATRIA
Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama**



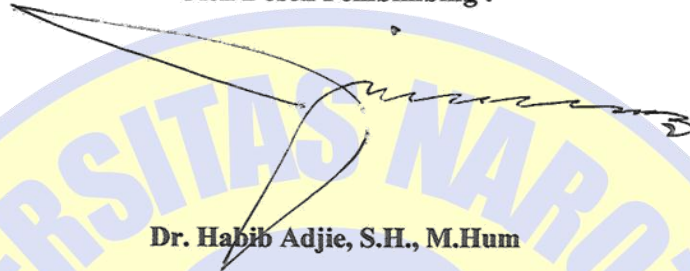
Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

LEMBAR PENGESAHAN

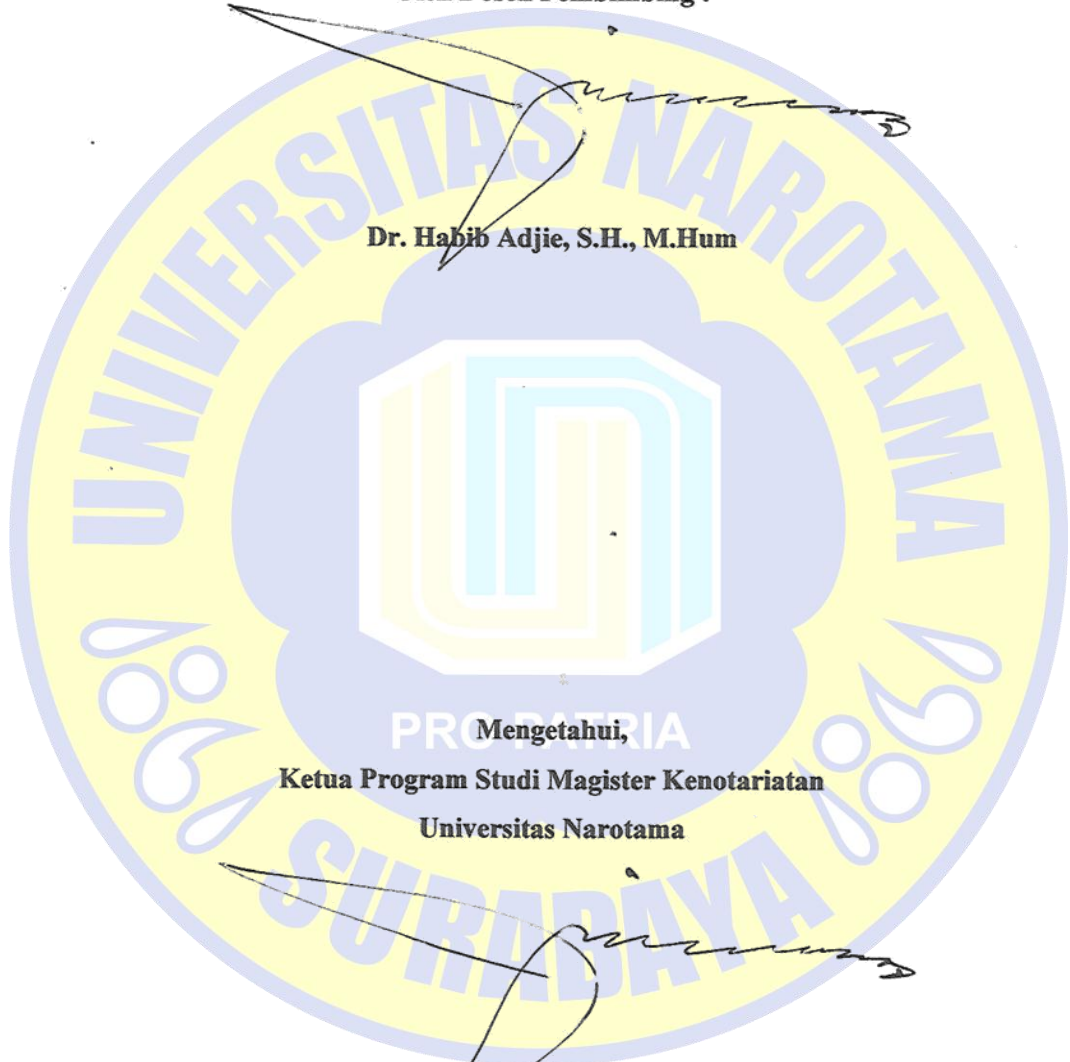
Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal Februari 2018

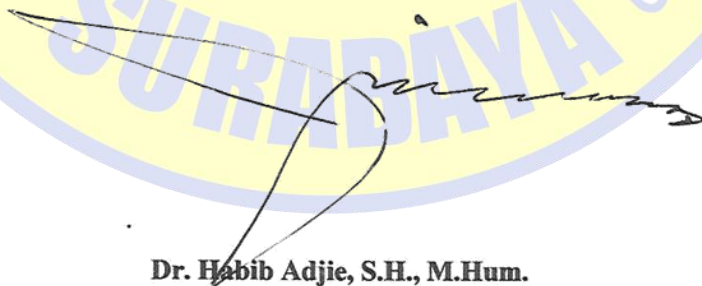
Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum



Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Narotama



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

TESIS

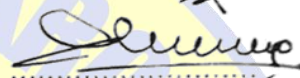
PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2018

TIM PENGUJI TESIS

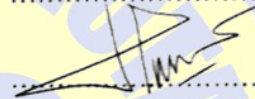
Ketua : Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.,H



Anggota : Dr. Sjaifurrachman, S.H., M.H



Anggota : Dr. Tanudjaja., C.N., M.H., M.Kn



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

SURAT PENUGASAN

No. 199/NR-FH/03/III/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Tesis
H.R. Ibnu Arly S.H., M.Kn. <i>Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum</i>	12214038	Meilany Liembono	Implementasi Asas – Asas Lelang Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dilihat Dari Perspektif Kepastian Hukum

Pembimbing yang namanya tercantum diatas, ditugaskan untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul yang dimaksud.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRO PATRIA

Surabaya, 12 Maret 2016



Prof. Dr. H. AFDOL, S.H., M.S.



UNIVERSITAS

Narotama

EST. 1981-2008 TUV NORD

FAKULTAS HUKUM**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN****Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578**

No Dokumen : FM-MKn-05-01

Tgl Terbit : 10 Desember 2014

Revisi : 00

FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS*

Nama Mahasiswa : Meilany Liembono
 No. Induk Mahasiswa : 12214038
 Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan / VIII

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Tesis) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. IMPLEMENTASI ASAS-ASAS LELANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSA-
2. NAAM LELANG DI LIHAT DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM.

Untuk disetujui sebagai Judul Tesis dengan Pembimbing:

1. H.R. IBNU ARLY.
2. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum
3. _____

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Surabaya, 8 MARET 2016
Mahasiswa

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

MEILANY LIEMBONO

* Pengajuan Judul Tesis harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Tesis
3. Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 2 (IPK Minimal 2,75)
4. F/C Sertifikat Seminar MKn



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. HABIB ADJIB, S.H., I

Jabatan Fungsional : Kaprodi

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk membimbing:

Nama Mahasiswa : MEILANY LIEMBONO

No. Induk Mahasiswa : 12214038

Judul : PENERAPAN ASAS – ASAS HUKUM LELANG DALAM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
LELANG

Surabaya,,, 2016

Calon Pembimbing,

PRO PATRIA

*) Pengajuan calon pembimbing dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Kaprodi mengenai nama calon pembimbing.



UNIVERSITAS
Negeri Jember
1963-1966-2000 JEMBER

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Meilany Liembono
No. Induk : 12214038
Alamat : Jalan Teluk Sampit No. 35 Surabaya
Telp/HP : 082234908084
Pembimbing : DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum
Judul Tesis : PENERAPAN ASAS – ASAS HUKUM LELANG DALAM PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.06/2010 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
Tgl Dimulai :

Surabaya, 20 - 2 - 2017
Mahasiswa

Pembimbing


DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum


Meilany Liembono

Mengetahui,
Ketua Program Studi


DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS Narotama
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL*

Nama Mahasiswa : MELCANY UEMBONO

No. Induk Mahasiswa : 12214038

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan /

Dengan ini mengajukan permohonan SEMINAR PROPOSAL TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM LELANG DALAM PERATURAN
MENTRI KEUANGAN NO. 93 / PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN LELANG

Menyetujui Untuk Diseminarkan
Pembimbing,

Surabaya,, 2016
Ka. Prodi



* Pengajuan seminar proposal tesis diajukan paling cepat 1 (satu) bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat Penugasan Pembimbingan, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotocopy Surat Penugasan Pembimbingan
2. Proposal Tesis 3 rangkap



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
 Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN SEMINAR


Nama Mahasiswa : MEILANI UEM BONO

No. Induk : 12214032

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1.	EKKY TRIHASTARYO	Berlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Terlantar.	11-5-2016	
2.	SANTI MARDIANA	Tanggung Jawab Notaris selaku PPAT Terhadap Pembatalan A.T.B antara Suami Istri	11-5-2016	
3.	ISTANTI DYAH PURNAMA SARI	Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang Tidak di Paktikan terhadap pihak lain.	11-5-2016	
4.	LUTHER PARIYON	Berlindungan Hukum Terhadap Pemesanan Hak Atas Tanah Adat di Papua.	11-5-2016	
5.	Zainul Arifin	Hak Komunal Perlindungan atas tanah masyarakat Hukum Adat	31-5-2016	
6.	Marthin Sitegar	Berlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan ketentuan pasal 50 Kitab UUP.	31-5-2016	
7.	ARNOL PAUL K.D	Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris yang Tidak Tercatat Dalam Reputoriem.	31-5-2016	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Surabaya, 11-05-2016
Mahasiswa


Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
 Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN SEMINAR

Nama Mahasiswa : MELANY LIMBONO

No. Induk : 12214038

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1.	ABDULHAMAD FAIS	Prinsip Independensi Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta	31-5-2016	
2.	ABDULHADI	Prinsip good governance dalam pengawasan badan pertanahan nasional pada pendaftaran hak atas tanah	26-11-2016	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Surabaya, 31 05 , 2016
Mahasiswa

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum

MELANY LIMBONO



UNIVERSITAS
Narotama
1981 - 2018

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Meilany Liembono
No. Induk : 12214038
Alamat : Jalan Teluk Sampit No. 35 Surabaya
Telp/HP : 082234908084
Pembimbing : DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum
Judul Tesis : PENERAPAN ASAS – ASAS HUKUM LELANG DALAM PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.06/2010 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

Tgl Dimulai :

Surabaya, 20 - 2 - 2017
Mahasiswa

Pembimbing

DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum

Meilany Liembono

Mengetahui,
Ketua Program Studi

DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS*

Nama Mahasiswa : MEILANY LIEMBONO

No. Induk Mahasiswa : 12214038

Program Studi/Angkatan : Magister Kenotariatan /

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN TESIS pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

PENERAPAN ASAS – ASAS HUKUM LELANG DALAM PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
LELANG.

Mengetahui
Pembimbing,

Surabaya, 21 - 02 - 2018
Mahasiswa

DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Meilany Liembono

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya tulis yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di suatu perguruan tinggi di Indonesia, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, Februari 2018

Yang membuat pernyataan,



Meilany Liembono

NIM : 12214038

RINGKASAN

Tesis ini menganalisis mengenai penerapan akan peraturan – peraturan lelang yang menjamin kepastian hukum pemenang lelang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dipilih, yaitu Penerapan Asas – Asas Hukum Lelang Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK-06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Apabila pelaksanaan lelang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan prosedur, maka lelang tersebut sah dan tidak dapat dibatalkan, namun sebaliknya apabila menyalahi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam prosedur lelang yang adalah merupakan peraturan yang mengatur tentang lelang maka akan berakibat lelang tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Tujuan dari penerbitannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 adalah agar jalannya pelaksanaan lelang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan hasil dari pelaksanaan lelang itu sendiri memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yaitu bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang digunakan dalam menjawab permasalahan terdiri dari dua sub bahasan. Pada sub bahasan pertama membahas tentang Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terhadap Asas – asas Hukum Lelang dalam *Vendu Reglement* yang terdiri dari sejarah perkembangan lelang dan asas - asas hukum lelang sebagai dasar hukum lelang, fungsi dan asas hukum lelang, dan akta risalah lelang sebagai akta otentik yang menjamin kepastian hukum. Pada sub bahasan kedua membahas tentang jaminan perlindungan hukum bagi pemenang lelang, Teori-teori umum ini merupakan kumpulan pendapat lelang dan peraturan – peraturan

ABSTRAK

Guna menunjang pelaksanaan *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie* yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan suatu peraturan pelaksanaan dibidang lelang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sebagai peraturan pelaksanaan yang kedudukannya lebih rendah, idealnya isi atau materi peraturan menteri tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi atau materi *Vendu Reglement* sebagai Undang-Undang Lelang yang kedudukannya lebih tinggi, baik bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur secara tegas atau terhadap asas-asas lelang perlu diteliti lebih lanjut. Beberapa ketentuan tersebut antara lain seperti adanya pasal yang mengatur bahwa lelang dapat dilaksanakan walaupun peserta lelang hanya 1 (satu) orang dan adanya pasal yang mengatur bahwa harga limit bersifat tidak rahasia. Perlu diteliti lebih lanjut mengenai konsistensi isi atau materi peraturan pelaksanaan lelang tersebut terhadap asas-asas hukum lelang, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menjamin kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan dibidang lelang.

Untuk menjawab permasalahan diatas maka digunakan jenis penelitian yuridis normative dengan cara mengkaji dan menguji taraf sinkronisasi vertical antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terhadap *Vendu Reglement* sebagai Undang-Undang Lelang (*Ordonansi* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:89 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3). Disamping itu juga ditelaah mengenai asas-asas hukum lelang serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan beberapa pasal dalam peraturan pelaksanaan di bidang lelang yang dianggap tidak sesuai dengan asas-asas hukum lelang, tujuan dan hakikat dari pelaksanaan lelang. Beberapa pasal dalam peraturan pelaksanaan tersebut mengatur lain dari apa yang dikehendaki oleh *Vendu Reglement* sebagai peraturan pokok. Untuk menjamin kepastian hukum dalam peraturan lelang. Dan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas keberadaan peraturan pelaksanaan lelang tersebut dapat mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci : *Vendu Reglement*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menjamin kepastian hukum dalam peraturan lelang.

ABSTRAC

In order to support the implementation of Vendu Reglement and Vendu Instructie as that legacy of the Dutch Colonial Rules of Auction, the government through the Finance Minister, published a rule of implementing an Auction called the Regulation of Finance Minister Number 27/PMK.06/2016 about the Guidance of Implementing Auction. As a lower implementing rule, the content or the material of the minister's rule should not be contrary to the rule of Vendu Reglement as the higher rule of auction, neither in contrary to strictly managed in the Vendu Reglement. In fact, however, in implementing the rules, it is found that the consistency of some rules toward the principles of auction need to be analyzed accurately, Some of the rules are, for instance, there is a chapter regulates that the auction can be done even there is only one participant, and another chapter says that the limit price is not a secret. The consistency of the content or the material of the implementing regulations toward the principles of auction as well as some efforts to guarantee the certainty of law in the rules of auction need to be analyzed more accurately.

The type of the research used to answer the problems is the normative judicial research by studying and examining the synchronization level between The Rule of Finance Minister Number 27/PMK.06/2016 toward Vendu Reglement as the rules of Auction (Ordonansi February 28th 1908 Staatsblad 1908;89 as lastly revised with Staatsblad 194;31). Besides, the principles of auction and the principles of good law formation has been learned.

From the result of the research, it is found that some rules in implementing the auctions is not suitable with the principles, the goals, the nature of implementating the auction. Some chapters in the implementation rules are different from what is expected by Vendu Reglement as the main rule. To guarantee the certainty of law in the auction rules, The finance Minister should change some contrary rules, or the government and the Indonesian Council should commit the formation of a new Auction Rules which deals with the Indonesian's recent development. Those who feel harmed by this rule may propose a judicial review to Supreme Court.

Keyword: Vendu Reglement, The Rule of Finance Minister Number 27/PMK.06/2016, To guarantee the certainty of law in the auction rules.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PENERAPAN ASAS – ASAS HUKUM LELANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG”**.

Tesis ini merupakan hasil dari sebuah proses yang relatif panjang, memerlukan waktu, tenaga dan pikiran. Tanpa adanya semangat, motivasi, kesabaran dan kerja keras serta tidak lupa diiringi dengan doa dan usaha, tidaklah mungkin penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bimbingan, arahan, masukan dan bantuan dorongan moril, yang terus diberikan oleh Pembimbing serta pihak – pihak yang ikut mendukung dan memberikan semangat kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan penuh keikhlasan dan segala rasa hormat penulis ingin kesediaannya memberikan bimbingan Tesis dan arahan untuk kesempurnaan penulisan Tesis ini, sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

Penulisan Tesis ini tidak akan dapat terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari pembimbing dan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu Hj. RR. Iswachyu Dhaniarti, DS. ST. M.PH., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Afdol, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberi waktu dan kesempatan dan semangat sewaktu kuliah.
3. Bapak Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya sekaligus sebagai pembimbing utama dalam penyelesaian Tesis ini, yang senantiasa memberikan bantuan, motivasi, semangat, arahan dan dorongan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya Tesis ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya, atas segala ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan dan. Bapak/Ibu Karyawan dan Staf, Sekertariat Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberi pelayanan, bantuan dan petunjuk selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
5. Semua Rekan-Rekan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan VIII Universitas Narotama Surabaya, yang senantiasa saling memberi semangat, motivasi dan bantuan selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian Tesis ini.

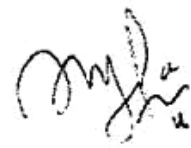
6. Secara tulus dan rasa hormat terimakasih penulis ucapkan kepada Kedua Orang Tua tercinta Butje Liembono & Kristina Talahatu, yang telah mendukung penulis secara materiil dan moril, serta adik, suami, anak – an ak, sahabat dan kerabat yang selalu mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dorongan, bantuan dalam segala hal yang berkaitan dengan masa depan saya.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Olehnya itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan Tesis ini.

Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan hukum berupa manfaat dan wawasan bagi semua pihak khususnya almamater Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya.

Surabaya, Februari 2018

Penulis



Meilany Liembono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Tim Penguji Tesis	iv
Surat Penugasan	v
Form Pengajuan Judul Tesis	vi
Form Kesediaan Membimbing Tesis	vii
Kartu Bimbingan Tesis	viii
Form Pengajuan Seminar Proposal	ix
Kartu Kehadiran Seminar	x
Kartu Bimbingan Tesis	xii
Form Pengajuan Ujian Tesis	xiii
Surat Pernyataan	xiv
Ringkasan	xv
Abstrak	xvi
Abstrac	xvii
Kata Pengantar	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian	10
4. Manfaat Penelitian	10
5. Originalitas Penelitian	11
6. Tinjauan Pustaka	12
7. Metode Penelitian	22
8. Sistematika Penulisan	26

**BAB II. KONSISTENSI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
LELANG TERHADAP ASAS HUKUM LELANG**

2.1. Kepastian Hukum Sebagai Tujuan Pembangunan Hukum	27
2.2. Kepastian Terhadap Asas-asas Hukum	32
2.3. Tinjauan Terhadap Kegiatan Lelang Di Indonesia	38
2.4. Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Yang Perlu Dikaji Intensif	48

**BAB III. UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK DAPAT
MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG LELANG**

3.1. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang	63
3.2. Prosedur Pelaksanaan Lelang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ...	66
3.3. Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Sebagai Pembeli Beretikad Baik	74
3.4. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Yang Diperoleh dari Akta Risalah Lelang	81

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	91
4.2 Saran	93

DAFTAR PUSTAKA